

## PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh: Sjahrudin Rasul

### ABSTRAK

Kurang memadainya sistem akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi negara dan tindakan-tindakan hukum mengakibatkan antara lain tumbuhnya penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya korupsi. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja, melalui pengembangan dan penerapan manajemen kinerja dengan menetapkan prioritas strategik pemerintah; melakukan perencanaan strategik dan operasional; serta mengukur dan mengelola kinerja pemerintah, dengan fokus pada pengukuran *outcomes, benefits dan impacts*. Dengan cara ini diharapkan upaya memberantas terutama mencegah tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kesempatan untuk berkembangnya perilaku koruptif harus ditekan/dihilangkan. Ini merupakan pekerjaan besar karena melibatkan seluruh sistem yang berarti juga menuntut peran aktif seluruh *stakeholders* pemberantasan korupsi, yaitu: aparat pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. Benang merah antara penerapan Manajemen Berbasis Kinerja dengan Pemberantasan Korupsi adalah terciptanya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan sumber-sumber daya secara keseluruhan yang berorientasi hasil. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, aparaturnegara, dunia usaha, dan masyarakat.

### PENDAHULUAN

Korupsi tumbuh dari adanya kewenangan yang diberikan oleh negara kepada seseorang tanpa disertai dengan sistem akuntabilitas yang memadai. Kunci untuk memberantas korupsi yang sudah berjangka langsung secara sistematis adalah dengan membangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi negara; selain melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap para koruptor

secara tegas dan konsisten serta berkelanjutan. Namun kondisi di Indonesia selama ini masih diwarnai oleh sistem informasi yang dimiliki pemerintah tidak berfokus pada hasil; praktik pengukuran dan pelaporan secara tradisional berfokus ke input (sumber daya apa yang dipakai, proses, dan ketaatan); kurang menekankan pada *outcomes* yang dicapai sebagai hasil usaha pemerintah, yaitu apa manfaat

